

# **ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BERLANDASKAN KONSEP *TRI HITA KARANA* DAN IMPLEMENTASI *GREEN ACCOUNTING***

**(Studi Kasus pada Subak Pemangket Awen Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana)**

Gusti Ayu Made Putri Rinjani Dhipayanti \*, Gst. Ayu Rencana Sari Dewi

Jurusan Ekonomi Akuntansi  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [nengputrii2510@gmail.com](mailto:nengputrii2510@gmail.com), [ayurencana@gmail.com](mailto:ayurencana@gmail.com)

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk Mengungkap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berlandaskan Konsep Tri Hita Karana Dan Implementasi Green Accounting, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang nantinya akan diproses melalui analisis data untuk menjawab dari rumusan masalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sistem pengelolaan keuangan Subak Pemangket Awen Barat sudah berjalan dengan baik. (2) Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Subak Pemangket Awen Barat sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas. Pengalokasian dana subak sesuai dengan konsep tri hita karena dimana aliran dana telah disalurkan untuk kepentingan upacara yadnya, bantuan sosial dan sarana prasarana kebersihan lingkungan. (3) Penerapan green screen accounting di Subak Pemangket Awen Barat sudah berjalan dengan baik.

**Kata kunci:** Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Tri Hita Karana, Green Accounting

## **Abstract**

This study aims to reveal financial management accountability based on the concept of Tri Hita Karana and implementation of green accounting. This research uses qualitative methods. Data collection techniques use observation, interviews, and documentation which will later be processed through data analysis to answer the problem formulation. The results of this study indicate that (1) the financial management system of Subak Pemangket Awen Barat has been running well. (2) Accountability for the management of Subak Pemangket Awen Barat Fund Allocation is already based on the principles of transparency and accountability. The allocation of subak funds is in accordance with the concept of tri hita karana where the flow of funds has been channeled for the purposes of yadnya ceremonies, social assistance and environmental cleaning infrastructure. (3) The implementation of green screen accounting in Subak Pemangket Awen Barat has been going well.

**Keywords :** financial management accountability, Tri Hita Karana, green accounting

## **PENDAHULUAN**

Bali merupakan provinsi yang memiliki berbagai macam budaya dan keunikan tersendiri, dan juga tidak terlepas dari destinasi wisata yang menjadi daya tarik para wisatawan. Salah satu keunikan yang dimiliki oleh masyarakat yaitu organisasi tradisional

*subak*. *Subak* merupakan organisasi yang didirikan untuk mengelola sistem pengairan pertanian masyarakat adat Bali yang senantiasa diidentikkan dengan kesederhanaan dan tradisional. Aktivitas operasional *subak* tidak hanya terbatas pengelolaan suber air sawah, tetapi *subak* juga melaksanakan kegiatan bersifat

religious dan pembangunan yang memerlukan banyak dana. *Subak* didirikan secara tradisional yang jauh dari perkembangan jaman, maka tingkat pendidikan *krama subak* juga relatif rendah. Tetapi, hal tersebut tidak membuat para *krama subak* hilang kepercayaan untuk mengelola sumber daya yang beragam, baik yang diperoleh dari *krama subak*, bantuan, maupun sumbangan sehingga keberadaan *subak* masih tetap eksis dan berkembang hingga saat ini (Sutawan, 2008).

*Subak* pada khususnya sebagai salah satu organisasi publik non pemerintah dan organisasi nirlaba yang juga tidak luput dari berbagai kritik dan tuntutan dari pihak pemberi sumbangan (pemerintah) dan juga pihak eksternal lainnya serta dari anggotanya yang memerlukan keterbukaan penggunaan dana dan pengelolaan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2015 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, dimana entitas nirlaba merupakan entitas yang tidak berorientasi pada laba namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya kepada penyandang dana dan society. Dalam suatu organisasi pengelolaan keuangan harus dipertanggungjawabkan kepada *krama Subak* sebagai pihak yang berkepentingan dalam kepengurusan *subak*.

Sistem *subak* merupakan ciri khas sistem pertanian di Bali. Menurut Pitana (1997) dalam (Sunaryasa, 2002), *subak* di Bali memiliki ciri, yaitu:

1. *Subak* merupakan organisasi petani pengelola air irigasi yang memiliki pengurus dan peraturan organisasi (*awig-awig*) baik tertulis maupun tidak tertulis.
2. *Subak* mempunyai suatu sumber air bersama, berupa bendungan (*empelan* ataupun saluran utama suatu sistem irigasi).
3. *Subak* mempunyai suatu areal persawahan.
4. *Subak* mempunyai otonomi, baik internal maupun eksternal.

5. *Subak* mempunyai satu atau lebih pura yang berhubungan dengan *persubakan*.

Hal inilah yang membedakan sistem pertanian di Bali dengan sistem pertanian di luar Bali. Konsep kebersamaan dalam kelompok petani di Bali diaplikasikan melalui kegiatan gotong royong yang merupakan ciri yang kuat dari masyarakat petani Bali. Konsep kebersamaan dalam kelompok petani di Bali diaplikasikan melalui kegiatan gotong royong yang merupakan ciri yang kuat dari masyarakat petani Bali. Seluruh warisan budaya yang dikenal di provinsi Bali sudah tentu memiliki suatu nilai religius yang merupakan sisi menarik yang senantiasa ingin kita ketahui. Sama halnya dengan organisasi *subak* di Bali, kepentingan bersama dari *subak* dipadukan dengan nilai-nilai agama Hindu, yang menjadikan organisasi *subak* mempunyai nilai sosial yang religius. Dengan kebersamaan dan sistem gotong royong yang diterapkan pada organisasi *subak*, serta ditambah juga dengan konsep *Tri Hita Karana* (tiga penyebab kebahagiaan yang utuh didalam kehidupan manusia) yang dijunjung tinggi sebagai dasar pelaksanaan setiap kegiatan dalam *subak*, maka para pakar petani yang merupakan anggota *subak* beranggapan bahwa *subak* mampu mengambil peran untuk turut serta melestarikan lingkungan serta membantu mewujudkan kemajuan di pedesaan. *Tri Hita Karana* merupakan konsep dasar yang dijunjung tinggi dalam *subak*, oleh karena itu *subak* melaksanakan kegiatan yang mengacu pada parahyangan (hubungan manusia dengan Tuhan), pawongan (hubungan manusia dengan manusia) dan palemahan (hubungan manusia dengan lingkungan). Dalam melaksanakan kegiatan operasional, *subak* memerlukan berbagai jenis sumber daya kolektif sebagai penunjang. *Subak* umumnya mempergunakan sumber daya yang diperoleh dari kalangan umum maka penting bagi masyarakat untuk mengetahui proses pengelolaan sumber daya tersebut karena sejalan dengan praktik akuntabilitas yang merupakan kajian yang marak dibahas.

Salah satu subak yang ada di Bali yaitu *Subak Pemangket Awen Barat* yang terletak di desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Subak tersebut dikelola oleh kelian subak yaitu bapak I Ketut Tinggal Ada. *Subak Pemangket Awen Barat* terletak di dua desa yaitu desa Tegal Badeng Timur dan desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, yang mempunyai areal seluas 165 hektar, dengan jumlah petani sebanyak 260 orang, dan terdapat sumur-sumur pompa sebanyak 8 (delapan) sumur pompa yang diketuai oleh masing-masing kelian tempek.

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, *Subak Pemangket Awen* tidak terlepas dari nilai-nilai religius yang dipercayai oleh umat Hindu di Bali, salah satunya yakni konsep *Tri Hita Karana*. Sebuah filosofi mengajarkan bagaimana mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang sempurna, dikenal dengan istilah *Tri Hita Karana* yang artinya menjalin hubungan antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam/lingkungan dan manusia dengan Tuhan, sehingga subak di Bali khususnya para petani telah menerapkan konsep *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* merupakan tiga penyebab terciptanya kebahagiaan yang terdiri dari *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan*. *Parahyangan* dalam *Subak Pemangket Awen* yaitu melaksanakan upacara/piodalan seperti upacara *Pangewiwit* atau *Nandur*, odalan *bale subak*, odalan *ulunsuwi*, odalan *ulundanu* dan *melasti* yang dilakukan setahun sekali. *Pawongan* adalah untuk menata perilaku anggota krama dalam melakukan hubungan harmonis pada Tuhan dengan pemujaan berdasarkan bhakti, hidup saling mengabdikan berdasarkan punia dan memelihara lingkungan alam berdasarkan konsep "asih", terdapat juga *awig-awig* tertulis pada subak untuk mengatur dan menata perilaku anggota krama. *Palemahan* adalah suatu areal sebagai wilayah *Subak Pemangket Awen Barat* untuk ditata agar semuanya dapat menjadi sarana untuk melakukan tiga kegiatan hidup yaitu berbakti pada Tuhan, pada *Subak*

*Pemangket Awen Barat* kegiatan yang dilakukan dalam palemahan yaitu melaksanakan gotong royong jika terjadi kerusakan ataupun terkena bencana alam.

Terdapat salah satu kearifan lokal yang menarik pada *Subak Pemangket Awen Barat* yaitu upacara *Pangewiwit* atau *Nandur*. Upacara tersebut merupakan simbolisasi penanaman bibit awal. Dimana disebutkan *Pangewiwit* adalah aktivitas setelah melakukan aktivitas ritual *Ngeluku*(membajak sawah). Dalam menentukan hari upacara *Pangewiwit/Nandur* diadakan sangkep/rapat subak terlebih dahulu untuk menentukan waktu yang tepat berdasarkan perhitungan bersama dengan pemangku subak. Dalam rapat tersebut dibahas varietas yang akan ditanam, pengamatan OPT secara kontinyu sebagai langkah kewaspadaan akan adanya serangan OPT, pengaruh DPI (Dampak Perubahan Iklim) dan pelaporan keuangan subak juga permasalahan yang ada disubak sekaligus solusi pemecahan masalah. Upacara *Pangewiwit* biasanya dilakukan pada musim tanam padi periode Oktober-Maret yang biasa disebut tanam *kertamasa*. Upacara tersebut dihadiri oleh pengurus inti dan *krama*/anggota subak yang diwakili oleh pengurus dari masing-masing kelompok tani, dengan dipimpin langsung oleh Pemangku Subak. Setelah selesai dilaksanakan upacara baru dilakukan penanaman awal sebagai simbolis untuk mengawali penanaman padi. Penanaman padi selanjutnya diperbolehkan pada keesokan harinya sampai habis masa tanam.

Dalam melakukan pengelolaan keuangan pada *subak* diperlukan pembukuan dan pelaporan keuangan secara akuntabel yang berkesinambungan. Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi (Turner and Hulme (1997) dalam (Mardiasmo, 2002;21). Meskipun dikatakan suatu konsep yang sangat sulit diwujudkan, hal ini tidak menjadi kendala pada organisasi *subak*. *Subak* memiliki *awig-awig* atau peraturan serta memiliki nilai religius yang tinggi. Namun, kesederhanaan yang dimiliki oleh

*subak* menjadi penyebab akuntabilitas yang disajikan oleh *subak* terganggu. Dalam pelaksanaan kegiatan baik upacara keagamaan, pembangunan maupun program perlu adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Laporan tersebut nantinya akan diungkap secara transparan pada saat *sangkep* (rapat) yang dilakukan dua kali dalam setahun yaitu tepatnya pada bulan Maret dan Oktober.

Dalam melaksanakan upacara keagamaan *Subak Pemangket Awen Barat* menggunakan dana Kas dan hasil penjualan pupuk. *Subak Pemangket Awen Barat* tidak mendapatkan dana intensif dari pemerintah kabupaten, hanya mendapat dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) dari provinsi sebesar Rp.50jt yang digunakan 50% untuk *Parahyangan*, 40% untuk *Palemahan*, dan 10% untuk *Pawongan*. Namun, semenjak pandemi pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan dana. Pada tahun 2020 dana BKK hanya sebesar Rp.25jt dan pada tahun 2021 dana BKK sebesar Rp.10jt belum termasuk pajak. Hal tersebut dikeluhkan oleh para *krama subak*, karena dana tersebut tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh *subak Pemangket Awen Barat*.

Adapun alasan lain yang mendasari penelitian ini bahwa di *Subak Pemangket Awen Barat* tingkat pendidikan *krama subak* masih kurang pendidikan *krama subak* rata-rata masih lulusan SD-SMA dan tidak ada yang berasal dari jurusan akuntansi. Dalam hal ini pendidikan sangat penting terutama untuk bendahara *subak* yang harusnya berasal dari jurusan akuntansi agar terciptanya suatu akuntabilitas. Bendahara *Subak Pemangket Awen Barat* tidak melakukan pencatatan anggaran terlebih dahulu dalam pengelolaan keuangannya, karena minimnya pendidikan dan pengetahuan mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan. Pengelolaan keuangan pada Laporan Pertanggungjawaban *Subak Pemangket Awen Barat* dicatat dengan sistem manual yaitu mencatat laporan keuangan secara tulis tangan pada buku laporan keuangan seadanya dan hanya

mencatat pemasukan dan pengeluarannya saja.

Pada *palemahan subak* yaitu melakukan gotong royong jika terjadi masalah pada *subak*, seperti contoh masalah yang sering terjadi yaitu sistem irigasi atau pengairan air ke lahan yang kurang baik, penyebab terjadinya masalah tersebut bisa dikarenakan faktor alam seperti musim kemarau dan juga bisa terjadi karena pembagian dalam pengairan lahan tidak merata. Selain itu, ada juga permasalahan pada pengelolaan bangunan *subak*, pengelolaan limbah dan juga kerusakan lainnya yang disebabkan oleh bencana alam. Dalam penanganan masalah yang terjadi pada *palemahan subak*, perlu adanya penerapan biaya-biaya dalam laporan akuntansi lingkungan (*Green Accounting*). *Green Accounting* adalah akuntansi yang menghitung dan memasukkan biaya-biaya pencegahan maupun yang terjadi akibat kegiatan operasional perusahaan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. *Green accounting* merupakan langkah awal yang menjadi solusi masalah lingkungan tersebut. Penerapan *green accounting* akan mendorong kemampuan untuk meminimalkan masalah lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan. Tujuan penerapan akuntansi lingkungan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya dan manfaat atau efek (Widnyani et al., 2015).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti menemukan permasalahan bahwa terdapat beberapa anggota *subak* yaitu para petani padi yang masih menggunakan pupuk mengandung pestisida hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Made Pasek 47<sup>th</sup> ia mengakui bahwa beliau pernah menggunakan pupuk yang mengandung zat kimia hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman dalam pemilihan pupuk. Hal serupa disampaikan oleh Nyoman Hartono 50<sup>th</sup> ia mengatakan bahwa ia menggunakan pupuk yang mengandung pestisida hal ini dilakukan untuk memusnahkan hama. Beberapa pendapat

yang disampaikan diatas memberikan kerugian bagi para petani hal ini disampaikan oleh Wayan Nadi 47<sup>th</sup> selaku anggota subak ia berpendapat bahwa penggunaan pupuk berbahan pestisida dan zat kimia memberikan kerugian bagi petani, hasil panen padi mengalami penurunan drastis sehingga petani mengalami banyak kerugian, ia juga menambahkan bahwa aliran air dari petani yang menggunakan pupuk dengan pestisida dan zat kimia mengalir ke lahannya dan hal ini menimbulkan ketidaknyamanan serta kerugian bahkan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan pengeluaran besar untuk perbaikan lahan. Permasalahan ini diakibatkan oleh minimnya SDM *krama* subak akibat kurangnya informasi kesehatan terhadap tanaman serta pemahaman tentang akuntansi lingkungan, maka dari itu perlunya pemahaman mengenai kesehatan terhadap tanaman dan akuntansi lingkungan agar para *krama* subak bisa menerapkan akuntansi lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian yang mendukung dari penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Meitriani et al., 2017) yang mengungkap praktik akuntabilitas pengelolaan keuangan berlandaskan konsep *Tri Hita Karana* pada *Desa Pekraman* (studi kasus pada *Desa Pekraman Dharmajati, Tukadmungga*) yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang *Desa Pekraman Dharmajati*, menggunakan konsep *Tri Hita Karana* dalam pengelolaan keuangan, proses pengelolaan keuangan berlandaskan konsep *Tri Hita Karana* dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan konsep *Tri Hita Karana* pada pengelolaan keuangan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Hardianti, 2017) yaitu mengungkap penilaian sistem pengendalian intern dengan konsep *Tri Hita Karana* pada perkumpulan petani pengguna air (P3A) subak Tibu Beleng di Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, yang bertujuan untuk mengetahui penerapan program sebagai sistem pengendalian intern, mengimplementasikan konsep *Tri Hita Karana* oleh pengurus, dan

pengimplementasian sistem pengendalian intern berdasarkan konsep *Tri Hita Karana*. Penelitian yang lain juga dilakukan oleh (Widnyani et al., 2015) yaitu mengungkap akuntabilitas pengelolaan sumber daya lembaga local *subak* dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di pedesaan (studi kasus pada *subak Tabola, Desa Pekraman Tabola, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem*) yang bertujuan untuk mengetahui sumber dana subak dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, proses pengelolaan keuangan yang dilakukan di *subak* dan penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan *subak*. Penelitian yang lain juga dilakukan oleh (Diani, 2018) yaitu analisis penerapan akuntansi lingkungan (*green accounting*) dalam pengelolaan limbah pada PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Dolok Ilir yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi lingkungan dalam pengelolaan limbah yang diterapkan oleh perusahaan. Dan penelitian yang lain juga dilakukan oleh (Hardianti, 2017) yaitu peran *green accounting* dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan untuk menunjang keberlangsungan usaha (studi pada PTPN Persero Pabrik Gula Takalar) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana *green accounting* sebagai inovasi mengurangi pencemaran lingkungan, dan bagaimana *green accounting* berperan dalam mendukung keberlangsungan usaha.

*Subak Pemangket Awen Barat, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana* merupakan *subak* yang dipilih sebagai objek kajian dalam penelitian ini. Adapun alasan yang mendukung dilakukannya penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan yaitu pertama sumber daya yang dikelola *subak* terbilang cukup banyak untuk suatu organisasi tradisional yang berada di lingkungan pedesaan. Kedua, tingkat pendidikan *krama subak* yang masih tergolong rendah dan kurangnya pemahaman mengenai akuntabilitas dan akuntansi lingkungan (*green accounting*). Ketiga, sistem akuntansi yang digunakan oleh *krama subak* masih secara

sederhana serta tidak membuat laporan mengenai akuntansi lingkungan (*green accounting*). Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti “Analisis Akuntabilitas Berdasarkan Konsep *Tri Hita Karana* dan Implementasi *Green Accounting* (Studi Kasus pada *Subak Pemangket Awen Barat*, Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana)”.

## METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer. Penelitian ini akan berfokus pada Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berlandaskan Konsep *Tri Hita Karana* dan Implementasi *Green Accounting*. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu *Krama Subak Pemangket Awen Barat*.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode diantaranya, (1) observasi , (2) wawancara, dan (3) dokumentasi. Dari data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan beberapa tahapan. pertama, tahap pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian, kedua, tahap reduksi data proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan maupun hasil wawancara dan observasi, ketiga, tahap penyajian data yaitu penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, terakhir, tahap penarikan kesimpulan yaitu penarikan simpulan dari data yang telah dianalisis sehingga menghasilkan simpulan akhir yang bisa menjawab pernyataan peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berlandaskan Konsep *Tri Hita Karana* dan Implementasi *Green Accounting***

Akuntabilitas sistem pengelolaan dana Subak Pemangket Awen Barat dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto dalam (Febri Arifiyanto & Kurrohman, 2014), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan dana Subak Pemangket Awen Barat dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuannya dalam Peraturan Subak Pemangket Awen Barat menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan dana subak di Kabupaten Jembrana harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Pengelolaan keuangan Subak Pemangket Awen Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD. Desadandilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- b) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Pemkab Jembrana direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.
- c) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Sesuai ketentuan tersebut sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan dana Subak Pemangket Awen Barat harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah. Ketentuan tersebut

menunjukkan adanya komitmen dari pengambilan keputusan untuk memenuhi prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana Subak Pemangket Awen Barat dan tingkat partisipasi masyarakat berkembang seiring dengan dijalankannya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Menurut pengertiannya Tri Hita Karana adalah tiga penyebab kesejahteraan di dalam kehidupan manusia. Pengertian tersebut diambil dari masing-masing katanya yaitu Tri yang artinya tiga, Hita yang artinya sejahtera dan Karana yang artinya penyebab. Ketiga unsur tersebut menurut Ida Bagus Putu Purwita menentukan eksistensi subak yaitu parhyangan, pawongan dan palemahan. Unsur-unsur tersebut hendaknya harus dijaga dan dikelola dengan maksimal sehingga mampu memberikan manfaat yang positif terhadap subak. Diantara ketiga unsur tersebut kelemahan yang merupakan unsur wilayah/ areal pertanian dengan batas alam tertentu seperti sungai, jalan, pematang besar, desa dan lain-lain memiliki hubungan berhubungan dengan *Green Accounting*

*Green Accounting* atau dikenal dengan akuntansi hijau adalah jenis akuntansi yang mencoba memasukan dan menghubungkan factor biaya lingkungan kedalam kegiatan perusahaan. *Green Accounting* memberikan gambaran terhadap upaya menjaga lingkungan dengan menggabungkan manfaat lingkungan dengan biaya dari keputusan ekonomi melalui hasil keuangan perusahaan (Kusumawardhany, 2022).

Berdasarkan hasil informasi yang disampaikan oleh I Ketut Tinggal Ada 50<sup>th</sup> sebagai berikut:

“Pemerintah Kabupaten sangat berkomitmen dalam mendorong partisipasi masyarakat, masyarakat diharapkan membayar pajak tepat waktu karena uang hasil pajak nantinya dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk Anggaran Dana Subak yang besarnya ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Terkait hubungannya dengan Tri Hita Karana yaitu hubungan dengan Tuhan subak berkontribusi dalam bentuk punia pada saat upacara subak atau upacara desa. Selain berkontribusi terhadap upacara desa, subak juga mengeluarkan biaya terhadap perbaikan lingkungan desa seperti jalan, sungai dan lain-lain”.

(Hasil wawancara dengan petani, pada tanggal 16 Agustus 2022)

Pendapat informan tersebut menunjukkan bahwa untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat desa dibutuhkan suatu komitmen dari Pemerintah Kabupaten dalam mengatur pengelolaan Anggaran Dana Subak di setiap desa. Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil dari kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Masyarakat dengan mengikuti musyawarah desa ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin menyelesaikan permasalahan di desa masing-masing.

Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, *akuntabel*, dan *responsive*. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan Anggaran Subak secara lengkap.

### **Perencanaan Alokasi Dana Subak Pemangket Awen Barat**

Alokasi Dana Subak adalah salah satu pendapatan subak yang penggunaannya sesuai dengan tujuan dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di subak yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Pelaksanaan prinsip partisipasi telah dibuktikan dengan hasil wawancara:

“Melalui musyawarah, yang melibatkan perwakilan subak adanya Anggaran Dana Subak ini masyarakat sangat senang sekali dan antusias untuk membangun subak sehingga bermanfaat untuk pertanian”

(Hasil Hasil wawancara dengan sekretaris subak I Gst.Ngr.Rai Nata, 43<sup>th</sup> pada tanggal 16 Agustus 2022)

Adapun tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh kelian subak dalam perencanaan anggaran dana Subak Pemangket Awen Barat yaitu sebagai berikut:

- a) Kepala Subak selaku penanggungjawab Anggaran Dana Subak mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan Anggaran Dana Subak
- b) Musyawarah subak dihadiri oleh unsur perwakilan masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan
- c) Tim Pelaksana Subak menyampaikan rancangan penggunaan Anggaran Dana Subak secara keseluruhan kepada pesertanya musyawarah.
- d) Rancangan penggunaan Anggaran Dana Subak yang disepakati dalam musyawarah subak, dituangkan dalam rencana penggunaan Anggaran Dana Subak yang merupakan salah satu bahan penyusunan APB Subak.

Musyawarah subak membuka kesempatan untuk masyarakat subak dalam memberikan aspirasinya sekali-gus sebagai media belajar bagi masyarakat subak terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan Anggaran Dana Subak. Unsur yang diundang dalam musyawarah subak ini meliputi Kepala Subak dan Unsur Kelembagaan Desa.

### Pertanggungjawaban Alokasi Dana Subak

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Subak Pemangket Awen Barat, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana beserta pelaksanaan kegiatan dilakukan secara fungsional. Pertanggungjawaban pengelolaan dana Subak Pemangket Awen Barat, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana berjalan dengan baik, sesuai dengan yang dikatakan informan berikut:

“Laporan pertanggungjawaban setiap tiga bulan sekali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan Anggaran Dana Subak yang mengundang tokoh masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam Anggaran Dana Subak dan diharapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya Anggaran Dana Subak” (Hasil wawancara dengan kelian subak I Ketut Tinggal Ada 50<sup>th</sup> , pada tanggal 16 Agustus 2022)

Pernyataan ini didukung oleh pengakuan dari seorang informan dari kecamatan sebagai berikut:

“Iya, artinya setelah SPJ selesai diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping dari kecamatan..” (Hasil wawancara dengan Kabid Pembangunan Jembrana, 16 Agustus 2022)

Pernyataan di atas didukung dengan hasil laporan pertanggungjawaban penjualan pupuk tahun 2021 Subak Pemangket Awen Barat yaitu pada tabel 2

**TABEL 2**  
**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENJUALAN PUPUK 2021**

No	Uraian	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo
1	Saldo Pertanggal 29 Maret 2021	-	-	15.945.000



2	Penjualan Pupuk Gadu	9.530.000	-	25.475.000
3	Keuntungan Penjualan Pupuk Urea	270.000		25.745.000
6	Keuntungan Penjualan Pupuk Urea Kertamasa	35.000		25.780.000
	Jumlah Pemasukan	9.835.000		25.780.000
	<b>Saldo</b>			
7	Pembayaran Pupuk Gadu		9.530.000	16.250.000
	Pelunasan Pupuk Urea Kertamasa		200.000	16.050.000
	Jumlah Pengeluaran		9.730.000	16.050.000
	<b>Jumlah Saldo Sementara</b>			

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa saldo awal di tahun 2021 Subak Pemangket Awen Barat, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sebesar Rp.15.945.000 dengan rincian pemasukan penjualan pupuk sebesar Rp.9.530.000, pemasukan penjualan pupuk sebanyak urea sebesar Rp. 270.000, penjualan pupuk urea kertamasa sebesar Rp.35.000 dengan pemasukan tersebut maka diperoleh pemasukan sebesar Rp. 9.835.000 sehingga total saldo yang diperoleh sebesar Rp. 25.780.000. Adapun pengeluaran yang tercatat yaitu pembayaran pupuk gadu sebesar Rp. 9.530.000 dan pelunasan pupuk urea kertamasa sebesar Rp.200.000 sehingga total pengeluaran pupuk tahun 2021 sebesar Rp.9.730.000. adapun saldo akhir sebesar Rp. 16.050.000

Dari hasil pemaparan di atas dapat dirangkum bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Subak Pemangket Awen Barat, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Implementasi Tri Hita Karana

Tri Hita Karana merupakan konsep hidup yang baik berdasarkan pada prinsip keselarasan, kebersamaan, dan

keseimbangan antara tujuan ekonomi, kelestarian lingkungan budaya, estetika dan spiritual yang dipergunakan sebagai landasan bagi individu dalam setiap aktivitasnya, khususnya pada Subak Pemangket Awen Barat, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh seorang informan yaitu sebagai berikut:

“Terdapat beberapa hal yang telah dilakukan oleh subak abian guna rasa syukur dan wujud bakti terhadap Tuhan yaitu dengan melaksanakan program kegiatan Upacara Yadnya seperti upacara desa yang dilaksanakan 1<sup>th</sup> sekali dengan jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp.3.000.000 ”. (Hasil wawancara dengan kelian subak I Ketut Tinggal Ada 50<sup>th</sup> , padatanggal 16 Agustus 2022).

Sejalan dengan pendapat salah seorang informan yang mengatakan bahwa :

“Subak Pemangket Awen Barat senantiasa memberikan bantuan sosial terhadap masyarakat serta pengurus subak abian yang tertimpa musibah, hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat sekitar” (Hasil wawancara dengan ketua rembug I Nengah Tantra 40<sup>th</sup>, pada tanggal 16 Agustus 2022)

Hal ini dibuktikan dengan laporan rincian penggunaan belanja bantuan keuangan subak yang dapat dilihat pada tabel 3

**TABEL 3**

**LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN PENERIMA  
BELANJA BANTUAN KEUANGAN SUBAK**

No	Nama Subak	Program/Kegiatan	Rincian Penggunaan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	2	3	4	5	6
2.	Subak Pemangket Awen Bara	Pembinaan Kemasyarakatan	Operasional Subak	1,500,000	1,500,000
			Operasional Pemerintah Desa	500,000	500,000
		Upacara Yadnya	Banten Ngusaba	2,000,000	2,000,000
			Banten Pengiwit	3,000,000	3,000,000
			Upakara Desa	3,000,000	2,000,000
			Bantuan sosial	2,000,000	2,000,000
			Perawatan lingkungan	8,000,000	8,000,000
<b>JUMLAH</b>				<b>20,000,000</b>	

Sumber: Data diolah, (2022)

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa Subak Pemangket Awen Barat, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana program kegiatan kemasyarakatan mendapatkan jumlah anggaran sebesar Rp. 20.000.000 dengan rincian penggunaan dan realisasi operasional subak sebesar Rp.1.500.000, penggunaan dan realisasi operasional pemerintah desa sebesar Rp.500.000, penggunaan dan realisasi banten ngusaba sebesar Rp. 2.000.000, penggunaan dan realisasi banten pengiwit sebesar Rp. 3.000.000, penggunaan dan realisasi upakara desa Rp. 3.000.000, penggunaan dan realisasi bantuan sosial terhadap krama subak sebesar Rp. 2.000.000, penggunaan dan realisasi sarana prasarana kebersihan lingkungan sebesar Rp. 8.000.000.

Berdasarkan hasil observasi oleh pengakuan dari I Made Sriana 50<sup>th</sup> sebagai bendahara subak menyatakan bahwa :

“Konsep Tri Hita Karena sangat erat hubungannya dengan pengelolaan dana sosial subak. Selain untuk keperluan pura (Parahyangan). Subak Pemangket Awen Barat juga mengelola dana

sosialnya untuk meningkatkan hubungan manusia dengan manusia (Pawongan). Terkait dengan pawongan, kami rutin memberikan sembako maupun sumbangan kepada masyarakat krama subak seperti saat adanya pandemic covid-19, kami membagikan sembako secara merata pada seluruh masyarakat krama Subak Pemangket Awen Barat”

(Hasilwawancara dengan I Made Sudiana 50<sup>th</sup> sebagai bendahara subak, 16 Agustus 2022

### Implementasi Green Accounting

*Green Accounting* adalah bidang ilmu akuntansi yang secara spesifik memperhatikan mengenai isu lingkungan. (K.Fleischman & Schuele, 2006) menyatakan bahwa *green accounting* mendeskripsikan upaya dari akademisi, penentu standar akuntansi, organisasi profesional, dan agensi pemerintahan di seluruh dunia untuk mendorong korporasi berpartisipasi secara proaktif dalam melestarikan lingkungan. Secara lebih spesifik hal ini dilakukan dengan cara menginformasikan aktivitas lingkungan dalam laporan tahunan atau laporan pengungkapan aktivitas lingkungan secara

husus. Implementasi *Green Accounting* sangat dibutuhkan dalam analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan Subak Pemangket Awen Barat, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana  
Adapun pendapat yang disampaikan oleh I Nengah Tantra 45<sup>th</sup> menyatakan bahwa :

“Kebersihan dan kelestarian lingkungan juga selalu kami jaga, seperti penyediaan

tempat sampah di lingkungan kami dan perbaikan lingkungan sekitar”

(Hasilwawancaradengan I Nengah Tantra 45<sup>th</sup> sebagai bendahara subak,16 Agustus 2022)

Argument ini didukung dengan laporan keuangan lingkungan Subak Pemangket Awen Barat yang dapat dilihat pada tabel 4

**TABEL 4**  
**LAPORAN KEUANGAN LINGKUNGAN**  
**SUBAK PEMANGKET AWEN BARAT 2021**

No	Nama Subak	Program/Kegiatan	Rincian Penggunaan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	2	3	4	5	6
2.	Subak Pemangket Awen Barat	Prawatan lingkungan	Biaya pencemaran lingkungan	2,000,000	2,000,000
			Biaya pencegahan	2,000,000	2,000,000
			Biaya kegagalan internal	2,000,000	2,000,000
			Biaya kegagalan eksternal	2,000,000	2,000,000
<b>JUMLAH</b>				<b>8,000,000</b>	

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat implementasi laporan keuangan lingkungan Subak Pemangket Awen Barat dengan program perawatan lingkungan mengeluarkan dana sejumlah Rp.8.000.000 dengan rincian biaya pencemaran sebesar Rp. 2.000.000, biaya pencegahan sebesar Rp.2.000.000, biaya kegagalan internal sebesar Rp. 2.000.000 dan biaya kegagalan eksternal sebesar Rp. 2.000.000.

#### **Pengawasan Alokasi Dana Subak**

Pengawasan terhadap dana Alokasi Dana Subak Pemangket Awen Barat, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana beserta

pelaksanaan kegiatan dilakukan secara fungsional, sesuai dengan yang dikatakan informan berikut:  
“Pengawasan dilakukan setiap hari senin dan kamis turun ke desa-desa mengkoordinasi yang terkait Alokasi Dana Subak, pembinaan yaitu kasipemerintahan beserta eserta secam dibawah naungan camat. Jadwal melalui undangan, kadang satu bulan dua kali.”

(Hasilwawancaradengan K abid Pembangunan Jembrana, 16 Agustus 2022)

Selain itu, pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Di kecamatan ada tim pendamping Alokasi Dana Subak mulai tahap perencanaan harus sesuai dengan pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Subak. Dari tahap perencanaan kita dampingi diharapkan nanti tidak ada kesalahan. Pada saat pelaksanaan kita juga mengadakan pendampingan, jadi kami mengetahui apabila ada potensi pelanggaran kita memberikan pembinaan atau teguran kepada kepala desa untuk memperbaiki pelaksanaannya. Dan apabila SPJ tidak lengkap, kami berikan saran dan pembinaan sehingga meminimalisir tingkat kesalahan.” (Hasil wawancara Keliian Subak I Ketut Tinggal Ada 50<sup>th</sup>, pada tanggal 16 Agustus 2022)

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berlandaskan Konsep Tri Hita Karana dan Implementasi Green Accounting, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap perencanaan Alokasi dana subak telah menerapkan prinsip Tri Hita Karana. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi masyarakat subak terhadap unsure parahyangan dalam bentuk berdana punia dalam pelaksanaan upacara desa. Subak juga berkontribusi pada unsure pawongan yaitu dalam bentuk memberikan bantuan terhadap masyarakat subak yang terdampak covid-19 serta kontribusi sudak pada unsure palemahan dalam bentuk pembelian sarana prasarana guna memperbaiki dan pemeliharaan lingkungan subak juga sekitarnya.
- 2) Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Subak telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh Anggaran Dana Subak. Untuk prinsip

akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.

- 3) Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Subak baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

### Saran

Mengacu kepada hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, selanjutnya dapat diajukan saran/rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.
- 2) Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Diani, A. (2018). *Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan (Green Accounting) dalam Pengelolaan Limbah Pada PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Dolok Ilir*. Universitas Muhammadiyah.
- Febri Arifiyanto, D., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 473. <https://doi.org/10.17509/jrak.v2i3.6598>
- Hardianti. (2017). *Peran Green Accounting Dalam Upaya Mencegah Pencemaran Lingkungan Untuk Menunjang Keberlangsungan Usaha (Studi pada PTPN Persero Pabrik Gula Takalar)*. Skripsi UIN Alauiddin Makasar.
- K.Fleischman, R., & Schuele, K. (2006). Green accounting: A primer. *Journal*

*of Accounting Education*, 24(1), 35–66.

<https://doi.org/10.1016/j.jaccedu.2006.04.001>

- Kusumawardhany, S. I. (2022). *STRATEGI GREEN ACCOUNTING SEBAGAI BAGIAN PENERAPAN ETIKA BISNIS PADA UMKM*. 2(2), 82–89.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Andi Offset.
- Meitriani, K. A., Atmadja, A., & MD, P. E. D. (2017). Mengungkap Praktik Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berlandaskan Konsep Tri Hita Karana Pada Desa Pakraman (Studi Kasus Pada Desa Pakraman Dharmajati, Tukadmungga). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Sunaryasa, I. M. O. (2002). *Upaya Revitalisasi Peran Subak dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan (Studi Kasus: Subak Jatiluwih dan Subak Kloda Tabanan, Bali)*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sutawan, N. (2008). *Organisasi dan Manajemen Subak di Bali*. Pustaka Bali Post.
- Widnyani, N. M. S., Atmadja, A., & Yuniarta, G. A. (2015). Mengungkap Akuntabilitas Pengelolaan Sumber Daya Lembaga Lokal Subak Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Pedesaan (Studi Kasus pada Subak Tabola, Desa Pakraman Tabola, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1).